

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 004 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI (WBBM) POLITEKNIK NEGERI BATAM 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen dan sinergi dari semua pihak di lingkungan kerja Politeknik Negeri Batam untuk dapat membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Politeknik Negeri Batam;
  - b. bahwa diperlukan dokumen yang dapat menjadi pijakan pedoman dalam menjalankan berbagai upaya pembangunan zona integritas di Politeknik Negeri Batam sehingga dapat terwujudnya aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata

Kerja Politeknik Negeri Batam;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 006 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 004 TAHUN 2021 TENTANG DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas, yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pimpinan satuan kerja dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ZI-WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,



- penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
  4. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.
  5. Tim Pelaksana, yang selanjutnya disingkat TP adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, internalisasi, pemantauan, dan pendampingan unit kerja dalam rangka pelaksanaan Pembangunan ZI.
  6. Tim Penilai Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat TPSK adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian Politeknik Negeri Batam dalam lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka pengusulan sebagai calon Satuan Kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.
  7. Tim Penilai Internal, yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penilaian Polibatam dalam rangka memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.
  8. Tim Penilai Nasional, yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia.

9. Sivitas akademika adalah warga kampus Polibatam yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dosen, dan tendik.
10. Direktur adalah Direktur Polibatam.
11. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.

## Pasal 2

### Fungsi

- (1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berfungsi salah satunya sebagai pedoman perencanaan kerja dalam pelaksanaan pembangunan satuan kerja Polibatam berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 2 Maret 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA  
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Arsiparis Ahli Muda  
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.  
NIP 198311112014041001





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

VOKASI  
KUAT. MENGUATKAN  
INDONESIA



DOKUMEN RENCANA KERJA

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK),  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI (WBBM) POLITEKNIK NEGERI BATAM  
2021-2024**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
2021





**DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK),  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
(WBBM)**

---

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**  
*2021-2024*

---

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
*2021***

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Politeknik Negeri Batam 2021-2024. Sebagaimana diketahui Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM menjadi hal yang sangat strategis karena merupakan pijakan pedoman dalam menjalankan berbagai upaya membangun zona integritas di Politeknik Negeri Batam. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini juga merupakan perwujudan komitmen dan sinergi dari semua pihak di lingkungan kerja Polibatam untuk dapat membangun zona integritas menuju WBK/WBBM di Politeknik Negeri Batam. Sebagaimana dengan pedoman pembangunan zona integritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dokumen Rencana Kerja tahun 2021-2024 di tingkat Polibatam memfokuskan pada rencana dan upaya-upaya kerja pada area 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun dokumen rencana kerja Zona Integritas 2021-2024 ini atas sumbangsih dan kontribusinya serta seluruh pihak yang telah mendukung langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian dokumen ini. Semoga keberadaan dokumen ini memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mari kita mulai melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan dalam dokumen tersebut.



Batam, Januari 2021

Direktur

Uuf Brajawidagda

NIP.197608112015041001

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Pengertian Umum.....	4
1.5 Kondisi Politeknik Negeri Batam.....	5
BAB II. Tahapan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM .....	10
2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas .....	10
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM .....	11
BAB III Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM .....	14
3.1. Tujuan dan Target Pembangunan Zona Integritas.....	14
3.2. Indikator dan Program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.....	15
3.3. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas.....	19
BAB IV. Monitoring dan Evaluasi .....	26
4.1. Monitoring .....	26
4.2. Evaluasi .....	27
BAB V. Penutup.....	28

## Daftar Tabel

Tabel 1 Jurusan dan Program Studi di Polibatam .....	5
Tabel 2 Indikator Capaian Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024 .....	9
Tabel 3 Rincian Bobot Komponen Pengungkit .....	12
Tabel 4 Rincian Bobot Komponen Hasil .....	12
Tabel 5 persyaratan minimal ZI WBK dan WBBM .....	16
Tabel 6 Indikator indeks untuk setiap aspek penilaian .....	16
Tabel 7 Indikator dan Program Kegiatan Pembangunan ZI.....	17
Tabel 8 Rencana Aksi Manajemen Perubahan .....	20
Tabel 9 Rencana Aksi Penataan Tata Laksana .....	21
Tabel 10 Rencana Aksi Penataan SDM Aparatur .....	22
Tabel 11 Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas .....	23
Tabel 12 Rencana Aksi Penguatan Pengawasan .....	24
Tabel 13 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .....	25

## Daftar Gambar

Gambar 1 Cakupan Layanan Polibatam saat ini .....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Batam.....	6
Gambar 3 Piagam Penghargaan dan Penandatanganan pakta integritas .....	10
Gambar 4 Model Hubungan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil ZI.....	11



# **BAB I. Pendahuluan**

## **1.1. Latar Belakang**

Politeknik Negeri Batam (polibatam) merupakan perguruan tinggi negeri vokasi yang terletak di Pulau Batam yang termasuk ke dalam kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam (Batam Free Trade Zone ) dan juga merupakan kawasan terdepan dan terluar yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Pada awalnya Polibatam merupakan Perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Batam yang beranggota unsur-unsur dari Institut Teknologi Bandung, Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam. Seiring dengan perkembangan kinerja dan prestasi yang telah ditunjukkan Politeknik Batam selama satu dasawarsa, pada 18 Oktober tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 26 tahun 2010 menetapkan Politeknik Batam secara resmi sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia

Sebagai satuan kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat melalui penyelenggaraan program pendidikan vokasi unggul yang berorientasi pada pasar kerja, Polibatam senantiasa mendukung kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan Kementerian. Termasuk diantaranya program reformasi Birokrasi sebagai pijakan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Inti dari pelaksanaan birokrasi yang telah digariskan Kementerian dan dijalankan oleh Polibatam adalah perubahan mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan langsung hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh elemen sistem yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung kepada mental aparatur. Program reformasi Birokrasi menjadi sangat strategis bagi polibatam mengingat Polibatam tergolong Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang masih perlu membangun dan memperkuat tata kelolanya sebagai entitas pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RB-Kemendikbud), yaitu:

1. birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi;
2. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah, khususnya di Polibatam sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran RB-Kemendikbud dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan RB- Kemendikbud yang telah dilakukan pada satuan kerja, serta untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani maka dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud termasuk di Polibatam.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, salah satu fokus strategi nasional pencegahan korupsi adalah Penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi, dimana korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Salah satu subaksi pada sektor Reformasi Birokrasi untuk mengatasi tantangan dan mencapai sasaran dalam pencegahan korupsi terkait reformasi birokrasi tersebut yaitu melalui pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polibatam merupakan upaya untuk menyelenggarakan Polibatam yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta merupakan strategi pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, sebagai bagian dari pencapaian Reformasi Birokrasi.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Polibatam sebagai satuan kerja Kemendikbud dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja ini

1. Sebagai pedoman perencanaan kerja dalam pelaksanaan pembangunan satuan kerja Politeknik Negeri Batam berpredikat ZI-WBK/WBBM
2. Sebagai acuan bagi tim pelaksana, tim penilai internal, pimpinan Politeknik Negeri Batam, dalam melakukan monitoring dan evaluasi upaya pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
3. meningkatkan kualitas tata kelola satuan kerja Polibatam yang akan diajukan menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
4. Mendukung peningkatan efektivitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani Polibatam mengacu kepada:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- b) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- e) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
- k) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;

- l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
- m) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1176/P/2020 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- n) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- o) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam masa bakti tahun 2020-2024
- p) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024

#### **1.4. Pengertian Umum**

Beberapa pengertian umum yang digunakan dalam dokumen rencana kerja ini antara lain:

- a) Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pimpinan satuan kerja dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ZI-WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- d) Tim Pelaksana yang selanjutnya disingkat TP adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, internalisasi, pemantauan, dan pendampingan unit kerja dalam rangka pelaksanaan Pembangunan ZI.
- e) Tim Penilai Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat TPSK adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian Politeknik Negeri Batam dalam lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka pengusulan sebagai calon Satuan Kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.
- f) Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim Aparat Pengawasan



Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penilaian Polibatam dalam rangka memperoleh predikat ZI- WBK/WBBM.

- g) Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia.
- h) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- i) Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- j) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam

### 1.5 Kondisi Politeknik Negeri Batam

Berdasarkan Permendiknas 26 Tahun 2010 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Batam khususnya pada pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa, Sampai awal tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) bidang pengetahuan khusus dalam bentuk program studi yang ada Politeknik yang terbagi di dalam 4 jurusan seperti yang disajikan pada tabel berikut

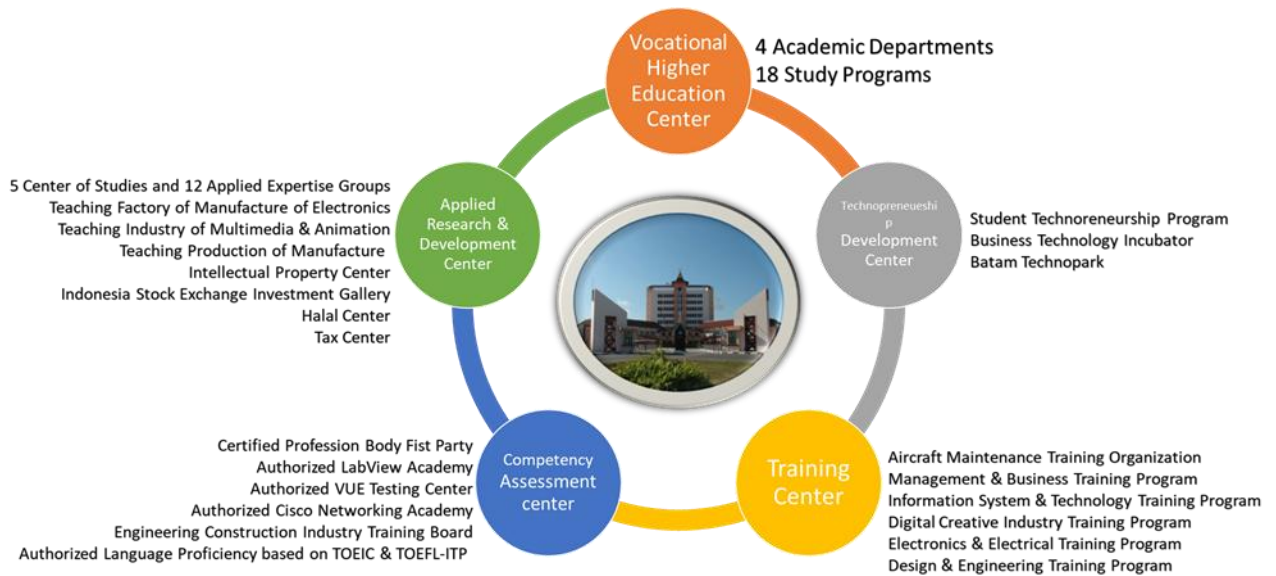
**Tabel 1 Jurusan dan Program Studi di Polibatam**

Jurusan	Program Studi	Jenjang	Masa Studi	Min SKS
Teknik Elektro	Teknik Elektronika	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Elektronika Manufaktur	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Instrumentasi	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Robotika	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Teknik Mekatronika	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Sarjana Terapan	4 tahun	144
Teknik Informatika	Teknik Informatika	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Geomatika	Diploma-3	3 tahun	108
	Multimedia dan Jaringan	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Animasi	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Keamanan Siber*	Sarjana Terapan	4 tahun	144
Teknik Mesin	Teknik Mesin	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Perawatan Pesawat Udara	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal	Diploma-3	3 tahun	108
Manajemen Bisnis	Akuntansi	Diploma-3	3 tahun	108
	Akuntansi Manajerial	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Administrasi Bisnis Terapan	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Logistik Perdagangan Internasional*	Sarjana Terapan	4 tahun	144

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

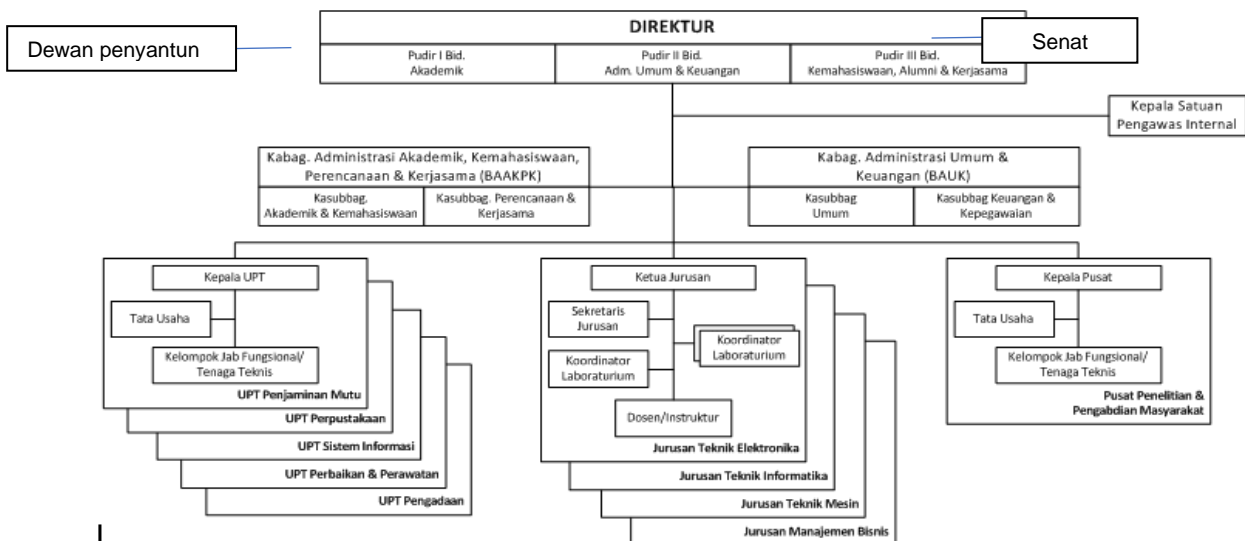
- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Tugas pokok dan fungsi Polibatam khususnya yang berhubungan dengan tridarma perguruan tinggi dijabarkan dalam 5 jenis layanan utama yang merupakan satu rangkaian yang terintegrasi dan saling mendukung yaitu (1) pusat layanan pendidikan vokasi dengan 4 jurusan dan 16 program studi, (2) pusat layanan litbang terapan; (3) pusat layanan pengembangan technopreneurship; (4) pusat layanan training dan (5) pusat layanan assessment kompetensi. Cakupan masing-masing layanan yang saat ini dijalankan Polibatam, disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1 Cakupan Layanan Polibatam saat ini**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di atas, Politeknik Negeri Batam menerapkan bentuk struktur organisasi yang juga mengacu pada Permendiknas 26 tahun 2010 dan dilengkapi dengan Peraturan Drekur Politeknik Negeri Batam no 014 Tahun 2017 sebagai berikut :



**Gambar 2 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Batam**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Politeknik Negeri Batam telah menyusun rencana strategis 5 tahunan yang sejalan dengan rencana strategi Kementerian pada periode yang sama. Visi sebagai cita-cita organisasi yang menjadi dasar dalam merumuskan dan menetapkan tujuan serta proses perencanaan ke depan adalah sebagai berikut:



**Menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, unggul, adaptif, inovatif dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045**

Generasi baru politeknik adalah politeknik yang penuh kepercayaan diri sekaligus kerendahan hati bahwa Polibatam adalah salah satu ujung tombak penting Indonesia agar mampu bersaing di tataran global melalui pemenuhan sumber daya industri, baik itu menumbuhkan industri pemula, mendampingi industri kecil, atau memperkuat industri besar nasional. Bermutu berarti Polibatam minimal mampu memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dengan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem penjaminan mutu yang terakreditasi. Unggul berarti Polibatam mampu memberikan layanan yang prima, menghasilkan keunggulan dan memperoleh pencapaian terbaik dalam bidang yang dikelola ditandai dengan akreditasi program studi dan institusi kategori unggul. Adaptif berarti Polibatam mampu secara cepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan baru yang dinamis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global. Inovatif berarti Polibatam mampu melahirkan berbagai terobosan dan hal-hal baru dalam memberikan layanan maupun menghasilkan output yang bernilai tambah dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Bermitra erat dengan Industri dan masyarakat berarti Polibatam mampu berkolaborasi dengan industri dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan keterlibatan industri dan masyarakat baik dari sisi input, proses maupun output tridharma perguruan tinggi. Indonesia maju dan sejahtera 2045 berarti visi Polibatam mendukung pencapaian visi Indonesia dalam menghasilkan generasi emas Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur

Misi Politeknik Negeri Batam mencerminkan alasan keberadaan Politeknik Negeri Batam untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, mengacu kepada tridharma Perguruan tinggi dan karakter organisasi yang modern yaitu:



**Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik**

Aktif berarti polibatam selalu berinisiatif, melibatkan diri dan menjalankan peran strategis dalam melakukan secara terus menerus baik dalam proses penciptaan, proses penyebaran, proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menghasilkan layanan

dan produk yang memenuhi standar nasional atau internasional kepada siapapun yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjalankan tata kelola organisasi yang baik. Keterbukaan organisasi menjadi kata kunci untuk bisa memulai kolaborasi dengan masyarakat dan industri. Polibatan harus mampu menurunkan ego dan pagar-pagarnya agar industri dan masyarakat mau bermain ke rumah Politeknik Negeri Batam

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, Politeknik Negeri Batam perlu mengembangkan tata nilai organisasi yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku anggota organisasi Polibatam dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan utama maupun pendukung dari pendidikan tinggi vokasi. Adapun tata nilai yang dimaksud disingkat dengan istilah dan artinya sebagai berikut :



- A** Adaptive & Agile  
Mampu secara lincah untuk bergerak cepat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang baru dan dinamis
- C** Collaborative & Customer-Centric  
Mudah bergaul dengan menunjukkan semangat kolaborasi yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna
- T** Trustworthy & Team-based:  
Layak dan memang dipercaya untuk menjalankan amanah sesuai kompetensinya serta selalu bekerja dan berkarya dengan pendekatan berbasis Tim
- I** Integrity & Innovative:  
Selaras hati, pikiran, perkataan dan perbuatan, jujur dan menjunjung nilai kebenaran dengan terus mencoba gagasan, metode ataupun hal-hal baru untuk kemaslahatan bangsa
- O** Open & Organistic:  
selalu menjadi organisasi yang terbuka dan dinamis dengan struktur birokrasi yang sederhana namun kaya fungsi
- N** Nurture & Nationalism:  
mengayomi anggota organisasi untuk tumbuh dan maju bersama lebih baik dan mengedepankan semangat kebangsaan dan cinta tanah air

Agar dapat mewujudkan visi dan misinya, tujuan strategis Politeknik Negeri Batam yaitu:

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
2. Terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu

Untuk pemenuhan tujuan “Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat”, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi



- b. Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan inovasi

Untuk pemenuhan tujuan “Terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu”, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas berorientasi kelestarian lingkungan dan mutu layanan dan tata kelola organisasi

Untuk mengukur pencapaian tujuan melalui sasaran strategis selama periode 2020-2024, telah disusun indikator pencapaian untuk masing-masing sasaran strategis dengan ketentuan:

- menggunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely*)
- berdasarkan pada indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- diperkaya dengan indikator kinerja tambahan yang memperkuat tata kelola institusi
- dilengkapi dengan target kinerja untuk dicapai setiap tahun selama lima tahun ke depan

Indikator kinerja strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis disajikan pada table berikut:

**Tabel 2 Indikator Capaian Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Ket
Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat	Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi	1 Akreditasi Institusi		
		2 Student Body minimum	mhs	kumulatif
		3 Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta	%	nominal
		4 Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	nominal
		5 Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir (bersifat	%	kumulatif
		6 Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	%	kumulatif
		7 Presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	kumulatif
		8 Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	kumulatif
		9 Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	kumulatif
		Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan	1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%
Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas hijau dan mutu layanan organisasi	1 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	nominal
		2 Persentase proses bisnis inistitusi berbasis TIK	%	kumulatif
		3 Status BLU/PTNBH	%	kumulatif
		4 Predikat SAKIP		nominal
		5 Predikat ZI/WBK WBBM	%	kumulatif
		6 Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	nominal

## BAB II. Tahapan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

### 2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

- Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polibatam telah dimulai dan ditetapkan/ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Batam beserta para pimpinan organ pelaksana di lingkungan Polibatam pada tanggal 8 Januari 2019 sebagai tindak lanjut penetapan Polibatam yang dinyatakan telah siap untuk membangun zona integritas yang ditandai dengan diteruskannya Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



**Gambar 3 Piagam Penghargaan dan Penandatanganan pakta integritas**

- Seiring dengan adanya perubahan kementerian dan pergantian kepemimpinan Polibatam pada tahun 2020 dan untuk tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dari para pimpinan Polibatam saat ini, telah dilakukan perencanaan kembali pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Polibatam yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur, para Pembantu direktur dan seluruh pimpinan organ pelaksana di lingkungan Polibatam pada tanggal 8 Januari 2021, bersamaan dengan Pelantikan dan pengambilan sumpah para pimpinan unit kerja baru di lingkungan Polibatam
- Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polibatam dilakukan setelah beberapa upaya yang dilakukan dan capaian diraih oleh Polibatam dalam beberapa tahun terakhir, antara lain: penerima hibah kompetitif PEDP ADB 2014-2019, Program Revitalisasi politeknik 2017-2019, telah menerapkan SMM ISO 9001:2015, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Akreditasi institusi B, Penghargaan dari Komisi Informasi Publik sebagai PTN badan publik yang cukup informatif, penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB, pengembangan unit layanan terpadu, tingkat kepatuhan LHKPN dan LHASN selalu 100% dan inisiasi penerapan Fraud Control Plan (FCP) dan beberapa capaian lainnya
- Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polibatam dilakukan di hadapan seluruh jajaran pegawai Polibatam, dilaksanakan secara terbuka dan

dipublikasikan secara luas ke masyarakat melalui laman resmi Polibatam <https://www.polibatam.ac.id> yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, seluruh channel media social resmi Polibatam di Instagram, facebook, twitter, serta di setiap titik publikasi yang didukung oleh perangkat digital display seperti videotron ukuran besar di depan Kampus dan videowall di dalam Gedung lingkungan kampus termasuk juga banner tercetak di lokasi-lokasi strategis dan piagam pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh pimpinan dan kepala unit kerja terpasang di dinding ruang pertemuan umum

## 2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan tindak lanjut pencaanangan Zona Integritas di Polibatam yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit dan berorientasi pada perubahan.

Berdasarkan PermenpanRB no 52 tahun 2014 yang diperbaharui melalui PermenpanRB no 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan maka dalam pembangunan zona integritas ada dua jenis komponen utama yang harus disiapkan oleh Politeknik Negeri Batam yaitu (1) Komponen Pengungkit dengan bobot penilaian 60% dan (2) Komponen Hasil dengan bobot penilaian 40%, dimana hubungan antar kedua komponen tersebut disajikan melalui gambar berikut



**Gambar 4 Model Hubungan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil ZI**

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tatalaksana, (3)

Penataan Manajemen SDM, (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tabel rincian bobot komponen pengungkit dalam penilaian Polibatam Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM disajikan sebagai berikut

**Tabel 3 Rincian Bobot Komponen Pengungkit**

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen hasil merupakan komponen yang mencerminkan pencapaian dua sasaran utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan melalui komponen pengungkit yaitu : (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang diukur dari survey eksternal mengenai nilai persepsi korupsi dan persentase penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP); (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur melalui survey eksternal mengenai nilai persepsi kualitas pelayanan. Artinya jika pelaksanaan reformasi birokrasi yang tercermin dari pelaksanaan aspek-aspek pada komponen pengungkit dapat berjalan efektif, maka hasil pengukuran ketercapaian sasaran utama reformasi birokrasi pada komponen hasil juga akan menunjukkan hasil yang lebih baik.

Tabel rincian bobot komponen hasil dalam penilaian Polibatam Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM disajikan sebagai berikut

**Tabel 4 Rincian Bobot Komponen Hasil**

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Polibatam, hal-hal umum yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

- a. Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada komponen pengungkit;
- c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi secara



- periodik
- d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
  - e. melaksanakan program atau kegiatan yang memberi manfaat langsung untuk masyarakat atau pemangku kepentingan;
  - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Polibatam ke masyarakat
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan

## **BAB III Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

### **3.1. Tujuan dan Target Pembangunan Zona Integritas**

Polibatam melakukan proses pembangunan dan pembenahan pada setiap jenis komponen pengungkit yang merupakan aspek pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan targetnya masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut

#### **1. Manajemen Perubahan**

Bertujuan untuk melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja di Polibatam sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Satuan Kerja dalam membangun Polibatam sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
- c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

#### **2. Penataan Tata Laksana**

Bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, terukur di Polibatam dan meningkatkan kepuasan pelayanan kepada pemangku kepentingan pada zona integritas menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
- c) meningkatnya kinerja; dan
- d) meningkatnya kepuasan pelanggan

#### **3. Penataan Sistem Manajemen SDM**

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Polibatam. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur

- c) meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- e) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

#### 4. Penguatan Akuntabilitas

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polibatam.

Target yang ingin dicapai melalui program ini:

- a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah di Polibatam; dan
- b) meningkatnya akuntabilitas Polibatam sebagai instansi pemerintah

#### 5. Penguatan Pengawasan

Bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Polibatam. Target yang ingin dicapai melalui program ini:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
- c) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara;
- d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; dan
- e) menurunnya temuan pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal

#### 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Target yang ingin dicapai melalui program ini:

- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional; dan
- c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

### **3.2. Indikator dan Program kegiatan Pembangunan Zona Integritas**

Indikator ketercapaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dikembangkan dari instrumen Lembar Kerja Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, yang bersifat kuantitatif berbentuk nilai (angka) sesuai persyaratan minimal yang telah ditetapkan untuk memperoleh WBK dan WBBM berdasarkan berdasarkan PermenpanRB no 10 tahun 2019. Sehingga indikator nantinya diharapkan memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Timely).

Berikut tabel persyaratan minimal dan skor minimal dari setiap komponen pengungkit maupun komponen hasil sebagai dasar penetapan indikator beserta target di dua jenis komponen utama pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut.

**Tabel 5 persyaratan minimal ZI WBK dan WBBM**

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,50	18,50
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5 (survey 3,60)	13,50 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	16 (survey 3,20)	18 (survey 3,60)

Berdasarkan tabel persyaratan di atas, disusun indikator dalam bentuk indeks untuk setiap aspek penilaian yang terdapat pada komponen pengungkit dan komponen hasil dengan memperhatikan nilai minimal dan maksimal yang wajib diperoleh untuk setiap aspek, seperti disajikan pada tabel berikut

**Tabel 6 Indikator indeks untuk setiap aspek penilaian**

No	Indikator	Bobot (skor maks)	WBK (min 60 %)	WBBM (min 75 %)
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
1	Indeks Manajemen Perubahan	8	4,8	6
2	Indeks Penataan Tata Laksana	7	4,2	5,25
3	Indeks Penataan SDM	10	6	7,5
4	Indeks Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,5
5	Indeks Penguatan Pengawasan	15	9	11,25
6	Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,5
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>	<b>40</b>		
1	Indeks Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	20	18,5	18,5
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	20	16	18
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>85</b>

Tabel di atas juga merupakan referensi dari tim pelaksana maupun tim penilai dalam mengukur, memonitor dan mengevaluasi kemajuan ZI melalui LKE ZI. Harapannya dengan mengacu pada indikator di atas untuk setiap aspek penilaian, maka upaya pembangunan zona integritas akan selaras dan komprehensif serta mengarah pada kondisi yang direpresentasikan dengan nilai tertentu

Program kegiatan dalam pembangunan zona integritas disusun untuk mencapai kondisi-kondisi standar yang direpresentasikan dalam bentuk angka penilaian maksimal pada Lembar Kerja Evaluasi ZI dari setiap aspek dari komponen pengungkit pembangunan ZI menuju WBK, yang rangkuman program kegiatannya disajikan pada tabel berikut

**Tabel 7 Indikator dan Program Kegiatan Pembangunan ZI**

Komponen	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi Bersih & Akuntabel	Birokrasi Kapabel	Pelayanan Publik Prima
<b>A. Komponen Pengungkit</b>					
Manajemen Perubahan	Indeks Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim kerja ZI yang akan mengawal penerapan ZI menuju WBK/WBBM	√	√	√
		Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	√	√	√
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	√	√	√
		Perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi	√	√	√
Penataan Tata Laksana	Indeks Penataan Tata Laksana	Penerapan, evaluasi dan penyempurnaan Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	√	√	√
		Pengembangan dan Penerapan E-Office dalam pengukuran kinerja, kepegawain dan pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	√	√	√
		Penetapan Kebijakan, penerapan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan Informasi Publik	√	√	√
Penataan SDM Aparatur	Indeks Penataan SDM Aparatur	Penetapan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	√	√	√
		Penetapan kebijakan, penerapan, monitoring dan evaluasi Pola Mutasi Internal	√	√	√
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	√	√	√
		Penetapan, implementasi, pengukuran dan evaluasi Kinerja Individu	√	√	√
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	√	√	√
		Pengembangan dan pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian	√	√	√
Penguatan Akuntabilitas	Indeks Penguatan Akuntabilitas	Penglibatan pimpinan dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan strategis	√	√	√
		Perencanaan, Pelaksanaan,	√	√	√



Komponen	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi Bersih & Akuntabel	Birokrasi Kapabel	Pelayanan Publik Prima
		pengukuran dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja			
Penguatan Pengawasan	Indeks Penguatan Pengawasan	Sosialisasi, Edukasi Penetapan dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi	√		
		Penetapan, penerapan dan pengelolaan SPIP	√		
		Penetapan kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut evaluasi terkait Pengaduan Masyarakat	√		
		Penetapan kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut evaluasi terkait Whistle Blowing System	√		
		Identifikasi, Sosialisasi, Penerapan dan monev terkait Penanganan bentuk kepentingan	√		
		Sosialisasi, Edukasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai yang akurat dan tepat waktu	√		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penetapan kebijakan standar pelayanan, pemakluman, dan penyusunan SOP yang mendukung			√
		Sosialisasi, Edukasi, pengembangan Budaya Pelayanan Prima termasuk system reward/punishment			√
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			√
<b>B. Komponen Hasil</b>					
Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	Indeks Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	Pengukuran Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) secara periodic terhadap stakeholder eksternal	√		
		Penyelesaian TLHP secara tuntas dan tepat waktu	√		
Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kualitas Pelayanan publik	Pengukuran Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) secara periodic terhadap pengguna layanan			√

### **3.3. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas**

Rencana aksi pembangunan zona integritas diturunkan dari tujuan, target, cara mencapai target indikator dan program kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman pembangunan zona integritas yang tertuang dalam permenpanRB 10 2019 dan Kepmendikbud .

Rencana aksi disusun lebih rinci per aspek dari komponen pengungkit dan komponen hasil pembangunan ZI dan memuat beberapa informasi yang sangat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan monev capaian ZI menuju WBK/WBBM. Item-item informasi yang dituangkan dalam rencana aksi setiap aspek tersebut terdiri dari:

- a. aspek dari komponen utama pembangunan ZI
- b. jenis indikator setiap aspek dari komponen utama pembangunan ZI
- c. program kegiatan yang mendukung peniaian setiap aspek
- d. output yang dihasilkan dari setiap kegiatan
- e. Tahapan Kerja dari setiap aspek
- f. Kriteria keberhasilan dari setiap aspek
- g. Data baseline berupa reaisasi capaian setiap jenis indikator di tahun 2020
- h. Target capaian dari setiap jenis indikator untuk tahun 2021-2024
- i. Waktu monitoring dan Evaluasi capaian target indikator setiap aspek
- j. Penanggung jawab tim aspek pembangunan ZI

Rencana aksi untuk setiap aspek dari komponen pengungkit dan komponen hasil disajikan pada tabel berikut

**Tabel 8 Rencana Aksi Manajemen Perubahan**

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2020	Target					Waktu Monitoring	Tim Kerja
							2021	2022	2023	2024			
1,	Indeks Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim kerja ZI yang akan mengawal penerapan ZI menuju WBK/WBBM	- Ketentuan mekanisme dan kriteria Pemilihan Tim ZI - Keputusan Penetapan TIM ZI Polibatam - Laporan Pelaksanaan pemilihan dan penetapan Tim ZI	- penyusunan mekanisme dan kriteria pemilihan Tim ZI - pelaksanaan rapat pembentukan tim ZI - pemilihan anggota tim ZI - penetapan anggota tim ZI	Tim ZI terbentuk dan menjalankan tugasnya mengawal pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	6	7	8	8	8	per semester	ketua sekretaris tim ZI, Koord Kepegawaian	
		Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBB thun 2021-2024	- pengumpulan data pendukung - penyusunan draft dokumen secara partisipatif - rapat pembahasan hasil penyusunan draft dokumen - penetapan dokumen rencana kerja pembangunan ZI - pembuatan laporan penyusunan dan penetapan dokumen - sosialisasi dokumen rencana kerja pembangunan ZI - pembuatan laporan hasil sosialisasi	Dokumen Rencana Kerja ZI menjadi acuan dalam sosialisasi, pelaksanaan dan monev pembangunan ZI								
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Pembangunan ZI minimal per semester	- Pembuatan dan penetapan panduan dan instrumen monev - Rapat Monev terhadap kemajuan target indikator, kendala pelaksanaan, dll, secara periodik - Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monev - Rapat evaluasi tindak lanjut dari hasil monev	Hasil Monev ditindaklanjuti								
		Perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi	- Keputusan Penetapan Nilai-Nilai Organisasi - Keputusan Penetapan Agen perubahan - Laporan kegiatan pembanguan pola pikir dan budaya kerja	- Pelaksanaan briefing secara rutin dari Pimpinan dalam menanamkan budaya kerja - Rapat pembahasan dan Penetapan agen perubahan - Edukasi dan Sosialisasi budaya kerja melalui agen perubahan - Rapat monev pengembangan budaya kerja	terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih positif sesuai nilai-nilai organisasi Pemimpin menjadi Role model dan agen perubahan berperan efektif dalam mendorong perubahan keterlibatan anggota organisasi dalam mendukung proses perubahan meningkat								

**Tabel 9 Rencana Aksi Penataan Tata Laksana**

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2020	Target				Waktu Monitoring	Tim Kerja
							2021	2022	2023	2024		
2,	Indeks Penataan Tata Laksana	Penerapan, evaluasi dan penyempurnaan Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	- SOP Kegiatan Utama	1. Reviu Peta Proses Bisnis 2. Penyusunan/Penetapan SOP sesuai Peta Proses 3. Sosialisasi SOP 4. Penerapan/Implementasi SOP 5. Reviu dan Improvement SOP	SOP sesuai peta proses dan dapat digunakan mendukung pelaksanaan layanan organisasi	4	5	6	7	7	per semester	Ka UPT PM Koord Perencanaan Koord Kepegawaian Koord PAKET
		Pengembangan dan Penerapan E-Office dalam pengukuran kinerja, kepegawain dan pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	- Laporan Pemanfaatan E-kinerja - Laporan Pemanfaatan E-Kepegawaian - Laporan pemanfaatan E-layanan publik	1. Penyiapan infrastruktur dan perangkat TI yang mendukung 2. sosialisasi, penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-kinerja , e-kepegawaian dan e-layanan publik 3. Penyusunan instrumen dan panduan monev pemanfaatan aplikasi TI 4. monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi e-kinerja, e-kepegawaian dan e-layanan publik 5. pelaporan hasil monev dalam pemanfaatan aplikasi e-kinerja, e-kepegawaian dan e-layanan publik	Tingkat pemanfaatan aplikasi E-kinerja, E-kepegawaian dan E-layanan publik cukup tinggi dan mendukung peningkatan kinerja organisasi dan anggota organisasi							
		Penetapan Kebijakan, penerapan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan Informasi Publik	- Penetapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik - laporan pelaksanaan monev penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	1. Penyusunan/Penetapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 2. Penyusunan dan penetapan SOP mekanisme keterbukaan informasi publik 3. Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik sesuai klasifikasinya 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan serta SOP keterbukaan informasi publik 5. Pelaporan pelaksanaan dan tindaklanjut hasil monev keterbukaan informasi publik	Termasuk dalam kategori badan publik yang sangat informatif							

**Tabel 10 Rencana Aksi Penataan SDM Aparatur**

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline	Target					Waktu Monitoring	Tim Kerja
						2020	2021	2022	2023	2024			
3.	Indeks Penataan SDM Aparatur	Penetapan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	- rencana kebutuhan SDM 2021-2024 - laporan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan SDM 2021-2024	(a) Mereviu peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (b) Menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (c) Berkoordinasi dengan unit kerja dan manajemen untuk penentuan kebutuhan dan kualifikasi (d) menetapkan rencana kebutuhan pegawai (e) Membuat draft usulan dan mengirimkan usulan formasi jika ada surat dari kemdikbud untuk permintaan formasi (f) mereviu dan mengevaluasi rencana kebutuhan jika dibutuhkan untuk disesuaikan (g) membuat laporan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana kebutuhan SDM	Rencana kebutuhan yang menjadi acuan sudah sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja terbaru	5	6	7	8	10	per semester	Ketua ZI, Koord Kepegawaian	
		Penetapan kebijakan, penerapan, monitoring dan evaluasi Pola Mutasi Internal	- Penetapan pola mutasi internal - Laporan Pelaksanaan dan evaluasi mutasi internal	(a) menyusun dan menetapkan kebijakan pola mutasi internal (b) sosialisasi ke pegawai mengenai penerapan pola mutasi/rotasi internal (c) Membuat draft usulan rotasi dan koordinasi dengan pudir2 terkait draft mutasi/rotasi (d) Mengkoordinasikan hasil rotasi dengan kepala unit yang pegawainya mengalami mutasi/rotasi (e) Melaksanaakan rotasi internal sesuai kebutuhan dan pengembangan karir serta menerbitkan SK rotasi (f) melakukan reviu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pola mutasi internal (g) membuat laporan tindak lanjut hasil monev	Pola Mutasi Internal dapat meningkatkan motivasi, loyalitas dan integritas pegawai dalam pengembangan karirnya ke depan sekaligus mendukung pengembangan organisasi								
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	- rencana pelatihan Pegawai berbasis kompetensi yang mendukung posisi /karir pegawai - Laporan Pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai	(a) melakukan gap analysis terkait kompetensi aktual pegawai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dari pekerjaan/jabatannya (b) Mengirimkan email ke kepala unit untuk membuat daftar rencana pelatihan setiap tahun (d) Merekap hasil rencana pengembangan pegawai setiap unit termasuk rencana studi lanjut pegawai (c) Mengidentifikasi usulan pelatihan unit dengan hasil gap analysis, dan anggaran yang tersedia sesuai dengan tingkat urgensi pelatihan yang diusulkan (d) Menetapkan persetujuan usulan pelatihan pegawai per tahun (e) melaksanakan pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik termasuk inhouse (f) Mengirimkan evaluasi pelatihan pegawai ke kepala unit untuk dievaluasi hasil pengembangannya (g) membuat laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai	Setiap pegawai mendapatkan kesempatan minimal 20 jam selama setahun mengembangkan kompetensi diri yang mendukung kinerja individu dan organisasi								
		Penetapan, implementasi, pengukuran dan evaluasi Kinerja Individu	Hasil Penilaian SKP masing-masing Pegawai	(a) sosialisasi penjelasan rencana target kinerja di tingkat unit kerja dan dampaknya terhadap SKP individu (b) penyusunan/pengisian dan penetapan SKP masing-masing pegawai yg mendukung kinerja unit kerjanya (c) pelaksanaan kegiatan/kerja untuk mencapai sasaran (d) pengukuran kinerja (e) pelaporan monitoring dan evaluasi hasil pengukuran kinerja	hasil penilaian Kinerja Individu sesuai kinerja dan masuk kategori minimal baik serta dapat mendukung pencapaian kinerja unit kerja dan institusi								
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Daftar pegawai yang ditetapkan melanggar aturan	(a) melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; (b) penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (ketepatan jam kerja); dan (c) penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku (d) pelaporan monev terkait penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Seluruh pegawai selalu patuh dan taat terhadap amanah konstitusi dan jenis pelerjaannya.								
		Pengembangan dan pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian	Data dan Informasi dari Sistem Informasi Kepegawaian Laporan Pemutakhiran Data dan informasi dari sistem jika ada	(a) sosialisasi penggunaan sistem informasi kepegawaian (b) pengisian dan pemutakhiran data secara berkala pada pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (c) membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi; dan (d) adanya integrasi SIM pegawai dengan SKP dan presensi	Data dan Informasi mengenai pegawai tersedia valid dan terupdate setiap saat								

**Tabel 11 Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas**

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/Keberhasilan	Baseline 2020	Target					Waktu Monitoring	Tim Kerja
							2021	2022	2023	2024			
4	Indeks Penguatan Akuntabilitas	Penglibatan pimpinan dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan strategis	1. Perjanjian Kinerja Direktur dgn setiap ka unit kerja yang telah ditandatangani 2. Dokumen Perencanaan, Progress dan Laporan capain kinerja yang ditandatangani Pimpinan 3. Notulensi dan Daftar hadir pimpinan dalam Pembahasan dan Evaluasi Perjanjian Kinerja	(a) rapat pembahasan penetapan target indikator kinerja IKU PTN dengan pimpinan (b) rapat pembahasan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan dan pelaporan kinerja dengan pimpinan (c) rapat pembahasan program kegiatan yang mendukung kinerja PTN dengan pimpinan	Pimpinan terlibat dalam setiap tahap pengelolaan akuntabilitas kinerja	6	7	8	9	10	Per triwulan	Ketua ZI Koord Perencanaan	
		Perencanaan, Pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja	1. Pernjanjian Kinerja Dirjen dan Direktur yang telah ditandatangani 2. Dokumen Renstra 2020-2024 3. Dokumen rencana kinerja per tahun 4. Rencana Aksi capaian kinerja per triwulan 5. Laporan Monev tentang capaian kinerja per triwulan 6. LAKIP	(a) rapat pembahasan penetapan target indikator kinerja IKU PTN dengan pimpinan (b) rapat penetapan dan penandatanganan PK dengan Dirjen (c) sosialisasi hasil penetapan PK ke unit kerja dan pegawai (d) pembahasan dan penetapan rencana kerja tahunan (e) sosialisasi dokumen rencana kerja tahunan (f) pengumpulan data-data capaian kinerja per triwulan rapat monev progres capaian kinerja (g) rapat monev progres capaian kinerja (g) penyusunan dan pengiriman LAKIP	SAKIP mendapat predikat " A "								



**Tabel 12 Rencana Aksi Penguatan Pengawasan**

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/Keberhasilan	Baseline 2020	Target				Waktu Monitoring	Tim Kerja	
							2021	2022	2023	2024			
5.	Indeks Penguatan Pengawasan	Sosialisasi, Edukasi Penetapan dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi	1. Perdir Pedoman Pengendalian Gratifikasi 2. Keputusan Penetapan Tim Pengendali Gratifikasi 3. Bahan Public Campaign Pengendalian gratifikasi 4. Laporan hasil dan tindak lanjut monev pengendalian gratifikasi 5. laporan kegiatan pengembangan kompetensi TPG	1. Menyusun dan menetapkan Pedoman dan SOP Pengendalian Gratifikasi 2. Rapat pembahasan Pembentukan dan penetapan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) 3. Sosialisasi dan public campaign tentang pedoman, mekanisme dan tim pengendalian gratifikasi 4. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi oleh TPG 5. Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi 6. Laporan hasil pengendalian dan tindak lanjut monev pengendalian gratifikasi 7. Peningkatan kompetensi pegawai terkait pengendalian gratifikasi	Seluruh pegawai memahami apa gratifikasi dan melaporkan jika mendapat gratifikasi	8	10	12	14	15	per triwulan	Ketua ZI Ka SPI Skr & Anggota SPI	
		Penetapan, penerapan dan pengelolaan SPIP	1. Perdir mengenai kebijakan dan Pedoman pelaksanaan SPIP termasuk terkait kode etik 2. Hasil Identifikasi Risiko 3. Rencana kerja dan jadwal kegiatan pengendalian 4. Bahan sosialisasi dan public campaign SPIP 5. Laporan Monev Penerapan SPIP dan tindak lanjutnya 6. Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SPIP	1. membangun lingkungan pengendalian termasuk penetapan kode etik dan penerapan FCP (Fraud Control Plan) 2. melakukan penilaian risiko atas unit kerja (identifikasi sampai registrasi) 3. melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; 4. Sosialisasi dan mengkomunikasikan informasi terkait implemetansi SPIP 5. melakukan monev dan penilaian implementasi SPIP 6. menyusun laporan hasil monev dan penilaian serta tindak lanjutnya penguatan SPIP 7. peningkatan kompetensi pegawai dalam implementasi SPIP	Nilai maturitas SPIP meningkat seiring dengan terkendalinya semua proses bisnis internal dan terhindar dari risiko								
		Penetapan kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut evaluasi terkait Pengaduan Masyarakat	1. Aplikasi SP4N LAPOR internal 2. Perdir Pedoman mekanisme penanganan pengaduan masyarakat 3. Keputusan penetapan tim SP4N LAPOR 4. Laporan Pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat yang masuk 5. Laporan Monev tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang masuk 6. Laporan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai terkait penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembuatan mekanisme dan Aplikasi SP4N LAPOR internal 2. Rapat Pembahasan Pembentukan dan penetapan tim SP4N LAPOR 3. Sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat 4. Monitoring dan Evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR maupun media pengaduan lainnya 5. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat 6. monev tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 7. penyusunan laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat 8. Pelatihan/peningkatan kompetensi dalam penanganan pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditangani dengan baik, cepat, solutif dan tuntas								
		Penetapan kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut evaluasi terkait Whistle Blowing System	1. perdir pedoman WBS 2. Aplikasi WBS 3. bahan sosialisasi WBS 4. Laporan Monev Pelaksanaan WBS 5. Laporan Tindak lanjut monev WBS 6. Laporan kegiatan peningkatan kompetensi tim WBS	1. Pembuatan Pedoman 2. Pembuatan Aplikasi WBS 3. Pembentukan tim WBS 4. Sosialisasi WBS 5. Pelaksanaan WBS 6. Monev WBS 7. Tindak lanjut Monev WBS 8. Peningkatan Kompetensi tim WBS	Seluruh pegawai memahami apa peran WBS dan bagaimana jika ingin menjadi WBS								
		Identifikasi, Sosialisasi, Penerapan dan monev terkait Penanganan benturan kepentingan	1. Keputusan Penetapan Peta benturan kepentingan 2. bahan sosialisasi penanganan benturan kepentingan 3. laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 4. laporan tindak lanjut monev pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 5. laporan kegiatan pengembangan kompetensi terkait penanganan benturan kepentingan	1. Mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh unit kerja 3. Melakukan implementasi penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh unit kerja 4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan secara berkala oleh unit kerja 5. meningkatkan kompetensi tim penanganan benturan kepentingan	Seluruh pegawai mengetahui apa saja yang termasuk benturan kepentingan dgn pekerjaannya dan menghindari terjadinya benturan kepentingan								
		Sosialisasi, Edukasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai yang akurat dan tepat waktu	1. Bahan sosialisasi pelaporan harta kekayaan pegawai 2. Bahan Bimtek/pendampingan pelaporan harta kekayaan pegawai 3. Laporan hasil monev kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan harta kekayaan pegawai	1. Melakukan sosialisasi ketentuan dan mekanisme mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai 2. melakukan bimtek atau refreshment atau pendampingan tata cara pelaporan harta kekayaan pegawai 3. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan harta kekayaan pegawai	LHKPN dan LHASN seluruh pegawai dilaporkan lengkap dan tepat waktu								

**Tabel 13 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2020	Target				Waktu Monitoring	Tim Kerja
							2021	2022	2023	2024		
6.	Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penetapan kebijakan standar pelayanan, pemakluman, dan penyusunan SOP yang mendukung	1. Perdir Kebijakan Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. SOP pelaksanaan standar pelayanan 4. Perbaikan hasil Standar pelayanan atau SOP, jika ada	1. Melakukan identifikasi pelayanan publik 2. Rapat pembahasan penyusunan dan penetapan standar pelayanan 3. Rapat Pembahasan penyusunan dan penetapan SOP pelaksanaan standar pelayanan 4. Sosialisasi kebijakan standar pelayanan dan SOP Pelaksanaannya 5. Menerapkan SOP pelaksanaan standar pelayanan 6. Monitoring dan Evaluasi penerapan standar pelayanan dan SOP 7. Melakukan revisi/perbaikan Standar pelayanan atau SOP jika diperlukan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan 4. Evaluasi pelaksanaan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Masyarakat pengguna layanan sangat puas dengan layanan yang diberikan	6	7	8	9	10	per triwulan	Ketua ZI Koord AK/ PAKET
		Sosialisasi, Edukasi, pengembangan Budaya Pelayanan Prima termasuk system reward/punishment, pengembangan sarana layanan terintegrasi dan inovasi layanan	1. pedoman budaya pelayanan prima 2. bahan bimtek /pelatihan pelayanan prima 3. Daftar Channel/media layanan 4. Ketentuan sistem reward/punishment bagi pegawai 5. ketentuan sistem kompensasi bagi pengguna 6. sistem layanan yang terintegrasi 7. inovasi layanan	1. Pembahasan penyusunan dan penetapan pedoman budaya pelayanan prima, sistem reward/punishment dan system kompensasi 2. Melakukan bimtek/pelatihan kompetensi pelayanan prima bagi pegawai yang terkait langsung dalam kegiatan pelayanan 3. Melakukan sosialisasi dan publikasi kemudahan akses memperoleh informasi ke pengguna 4. Melakukan reviu dan movev terhadap sistem layanan existing 5. Mengidentifikasi kebutuahn sarana layanan yang perlu dikembangkan termasuk pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi yang diperlukan 6. Melakukan pengembangan, pengintegrasian dan inovasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik	Masyarakat pengguna layanan semakin puas dengan layanan yang diberikan karena inovasi dan dukungan sistem layanan yang mudah diakses, cepat dan jelas							
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	1. Kuesioner survey kepuasan masyarakat 2. Infografis Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang dipublikasikan secara umum 3. Laporan analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan	1. Rapat pembahasan dan penetapan kuesioner kepuasan pelanggan 2. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner 3. penyebaran dan pengisian kuesioner kepada para pengguna layanan 4. Movev pelaksanaan penyebaran dan pengisian kuesioner 4. pengolahan data hasil kuesioner 5. penyajian infografis hasil pengolahan data kuesioneryang dipublikasikan secara terbuka 6. rapat pembahasan analisis dan tindak lanjut hasil pengolahan kuesioner kepuasan dari masyarakat 7 pelaksanaan tindak lanjut hasil pengolahan kuesioner	Hasil Survey kepuasan masyarakat pengguna dengan partisipasinya terhadap layanan diatas 85%							

## **BAB IV. Monitoring dan Evaluasi**

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM di Polibatam, maka Tim ZI WBK/WBBM juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI untuk setiap aspek pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mereview dan menyempurnakan siklus yang akan dilakukan, sehingga masing-masing aksi perubahan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal

### **4.1. Monitoring**

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan atau media baik ditingkat institusi satuan kerja maupun unit kerja di bawah direktur, yaitu antara lain:

- a. Pertemuan rutin di tingkat unit kerja dalam kurun waktu minimal 2 kali sebulan.
- b. Pertemuan koordinasi antar unit kerja yang terkait dalam kurun waktu minimal 1 kali sebulan
- c. Pertemuan review manajemen (Rapat tinjauan manajemen) dilakukan minimal 3 bulan sekali, kecuali ada hal yang mendesak untuk segera diselesaikan
- d. Melakukan risk assesment terhadap seluruh lini proses bisnis layanan
- e. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- f. Pengukuran target-target kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dengan realisasinya;
- g. Pertemuan dalam rangka monitoring pelaksanaan seluruh aspek ZI WBK/WBBM, yang dilakukan oleh kementerian.

## **4.2. Evaluasi**

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integrasi menuju WBK/WBBM di Polibatam dilaksanakan setiap bulan Mei dan bulan November. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan pembangunann ZI secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan ZI di tahun-tahun berikutnya

## **BAB V. Penutup**

Demikian Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (WBBM) Politeknik Negeri Batam. Semoga mendapat keberkahan dan kekuatan untuk merelisasikannya demi terwujudnya aparatur yang bersih, berintegritas dan profesional dan tata kelola Polibatam yang lebih baik



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**LOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA

## Hubungi Kami

---

### Web & Email

Web. [www.polibatam.ac.id](http://www.polibatam.ac.id)  
Email. [info@polibatam.ac.id](mailto:info@polibatam.ac.id)

### Facebook

Politeknik Negeri Batam

### Instagram & Twitter

@polibatamofficial  
@polibatamtv

### Telepon

(0778) 469 860

### Alamat

Batam Centre, Jl. Ahmad Yani,  
Batam, Kepulauan Riau 29461